

# **KEPASTIAN HUKUM PERSEROAN KOMANDITER SEBAGAI SUBYEK YANG DAPAT MEMILIKI HAK ATAS TANAH**

Nama : Martiono, Yohanes Halim  
Fakultas/Program Studi : Hukum/Magister Kenotariatan  
Pembimbing : Dr. Ir. Bagiyo Atmaja, S.H., Sp.N., M.Hum.

## **ABSTRAK**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kedudukan hukum Surat Edaran Menteri ATR/KBPN tentang pemberian status Hak Guna Bangunan bagi persekutuan komanditer. Berdasarkan kajian yang dilakukan Surat Edaran Menteri ATR/KBPN tersebut menurut bentuknya adalah surat dinas berupa instruksi kepada instansi vertikal di bawahnya yang berlaku mengikat sebagai peraturan kebijakan bukan peraturan perundang-undangan. Surat edaran seharusnya hanya berupa naskah dinas yang berisi pemberitahuan, penjelasan dan/atau petunjuk cara melaksanakan hal tertentu yang dianggap penting dan mendesak. Akan tetapi, materi/isi dari Surat Edaran Menteri ATR/KBPN No. 2/SE.HT.02.01/VI/2019 tersebut justru berisi norma layaknya peraturan perundang-undangan yang dapat berimplikasi pada konflik norma dengan UUPA. Pengaturan yang demikian bukan objek norma dari surat edaran yang seharusnya dibentuk semata-mata berdasarkan kewenangan yang dimiliki Menteri ATR/KBPN. Oleh karena itu, surat edaran tersebut seharusnya dapat dicabut atau dibatalkan.

Kata kunci: surat edaran menteri, hak guna bangunan, persekutuan komanditer

## LEGAL CERTAINTY OF THE COMMANDITIVE COMPANY AS A SUBJECT THAT MAY HAVE RIGHTS TO THE LAND

Nama : Martiono, Yohanes Halim  
Faculty/Study Progamme : Law/Master of Notary  
Contributor : Dr. Ir. Bagiyo Atmaja, S.H., Sp.N., M.Hum.

### ABSTRACT

*This research aims to examine the legal position of the Circular of the Minister of ATR / KBPN on granting Building Use Rights status to limited partnership. Based on a study conducted by the Circular of the Minister of ATR / KBPN, according to its form, it is an official letter in the form of instructions to the vertical agencies under it which are binding as policy regulations not statutory regulations. Circular letters should only be in the form of official texts containing notifications, explanations and / or instructions on how to carry out certain matters deemed important and urgent. However, the material / content of the Circular of the Minister of ATR / KBPN No. 2 / SE.HT.02.01 / VI / 2019, in fact, contains norms like laws and regulations which may have implications for norm conflicts with UUPA. Such regulation is not the object of the norm of a circular which should have been established solely on the basis of the authority of the Minister of ATR / KBPN. Therefore, the circular should be revoked or canceled.*

*Keywords: ministerial circular, building use rights, limited partnership*